

Wapres Dorong Papua Selatan Jadi Sentra Pangan Nasional

MERAUKE (IM) - Wapres (Wapres), Ma'ruf Amin melihat Papua Selatan bisa menjadi sentra pangan nasional. Pasalnya kawasan ini memiliki sejumlah potensi yang mampu membuatnya tumbuh dengan pesat.

"Kita akan terus dorong Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia," kata Ma'ruf di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6).

Provinsi yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini ini, diyakini Wapres mampu menggenjot ekonomi masyarakat dan wilayah. "Serta mendekatkan pelayanan publik hingga masyarakat di pelosok per-

batasan," papar dia. Wapres menyebut pemerintah telah meluncurkan rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041. Rencana itu memiliki tiga misi, yakni Papua sehat, Papua Cerdas, dan Papua produktif.

"RIPPP ini akan menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua," ujar dia.

Selain itu, Ma'ruf ingin potensi pariwisata Papua Selatan dimaksimalkan. Misalnya dengan membuat wisata sejarah di Boven Digoel hingga festival Asmat.

"Supaya menjadi destinasi wisata berkelas dunia," jelas dia. ● **pra**

Pemkab Tangerang Targetkan 284.085 Anak Dapat Akses Posyandu

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, menargetkan sebanyak 284.085 anak di daerah itu mendapat akses layanan posyandu melalui program 'Grebek Tegas' sebagai akselerasi menekan angka stunting.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa (4/6), menyampaikan bahwa pelaksanaan posyandu dimulai secara serentak pada tanggal 3 Juni 2024 dengan jumlah sasaran 284.085 anak balita di 2.352 posyandu.

"Kegiatan ini dilaksanakan bersama, berbagai pihak terkait, selain pemerintah yaitu dengan PKK, kader posyandu, rumah sakit, swasta dan stakeholder lainnya yang semuanya sudah siap di lapangan untuk suksesnya grebek posyandu," tuturnya.

Dia berharap dengan komitmen, sinergitas dan kolaborasi semua unsur, kegiatan Grebek Tegas yang

dilaksanakan dapat mem-buahkan hasil maksimal dalam rangka penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Dengan satu tekad, sinergitas dan kolaborasi semua unsur, harapan kita semua kegiatan ini dapat mem-buahkan hasil yang maksimal untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tangerang, menggelar kegiatan posyandu serentak di 29 kecamatan melalui program 'Grebek Tegas'. Program posyandu ini merupakan program serentak yang dicanangkan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Kegiatan tersebut, bertujuan antara lain untuk melakukan pendataan dan pengecekan secara komprehensif dan menyeluruh terhadap kondisi balita, anak-anak dan ibu hamil untuk mencegah dan mengatasi stunting. ● **pp**



GERAKAN SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI TANGERANG
Petugas memeriksa tinggi badan seorang anak di Posyandu Anyelir, Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/6). Dinas Kesehatan Kota Tangerang melaksanakan Gerakan Serentak untuk Anak Tangerang Sehat dan Cerdas di 1.097 posyandu dalam mencegah kasus stunting.

Pemkot Tangerang Masih Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah masih membuka gerai layanan konsultasi hukum bagi masyarakat tanpa dipungut biaya atau gratis.

Asda Pemkot Tangerang, Deni Koeswara di Tangerang, Selasa (4/6), mengatakan di gerai layanan ini masyarakat bisa berkonsultasi mengenai bantuan hukum terkait perdata maupun pidana.

"Program ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan tidak dikenakan biaya. Jadi memanfaatkan kesempatan ini jika ada yang membutuhkan bantuan hukum," katanya.

Deni menambahkan disediakannya gerai ini untuk memenuhi hak asasi masyarakat Kota Tangerang dalam pemenuhan atas bantuan hukum.

Oleh karena itu memberikan pelayanan konsultasi hukum gratis adalah sebagai salah satu bentuk pemenuhan atas hak konstitusional masyarakat Kota Tangerang.

"Pemkot berupaya memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum yang sedang dihadapi," kata dia. Ia menjelaskan gerai layanan konsultasi hukum berada di Lantai LG Tangcity Mall Kota Tangerang pada 27 Mei hingga 7 Juni 2024 mendatang. Gerai ini beroperasi mulai pukul 10.00 WIB-14.00 WIB.

yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum yang sedang dihadapi," kata dia.

Ia menjelaskan gerai layanan konsultasi hukum berada di Lantai LG Tangcity Mall Kota Tangerang pada 27 Mei hingga 7 Juni 2024 mendatang. Gerai ini beroperasi mulai pukul 10.00 WIB-14.00 WIB.

Selain konsultasi hukum gratis, apabila masyarakat Kota Tangerang membutuhkan bantuan hingga persidangan akan diberikan pendampingan hingga proses litigasi dan inkracht.

"Namun, terkait pendampingan hingga litigasi dan inkracht hanya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat," ujarnya.

Ia pun berharap, dengan layanan konsultasi hukum gratis di ruang publik seperti ini, dapat mengedukasi masyarakat agar lebih mengerti dan peduli pada hukum.

"Di luar kegiatan konsultasi hukum gratis di ruang publik ini, masyarakat juga dapat mengunjungi Bagian Hukum di Kantor Puspem Kota Tangerang pada hari dan jam kerja," pungkas Deni Koeswara. ● **pp**



REST AREA TANJUNG LESUNG TERBENGKALAI

Suasana bangunan rest area Tanjung Lesung yang terbengkalai di Pandeglang, Banten, Selasa (4/6). Bangunan rest area di kawasan Tanjung Lesung yang dibangun oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2018 dengan anggaran mencapai Rp1,4 miliar tersebut kondisinya terbengkalai tanpa perawatan dan ditumbuhi rumput liar.

SATPOL PP ANCAM SANKSI TIPIRING

Peredaran Miras di Pandeglang Makin Meresahkan

Para penjual miras agar menghentikan penjualan miras, jika belum memiliki izin untuk berjualan. Karena bila para penjual ini tetap berjualan tanpa adanya izin, baik itu distributor atau pengecer, maka siap-siap berhadapan dengan aparat Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang.

PANDEGLANG (IM)

- Peredaran minuman keras (miras) di wilayah Pandeglang semakin meresahkan. Para pengedar dan penjual yang terlibat dalam peredaran miras ini dapat dikenai tindakan pidana ringan (tipiring).

Sanksi ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah (Perda) untuk memberantas peredaran miras yang menjadi penyakit

masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang, terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kesusilaan, Miras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikenakan sanksi Tipiring.

Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) pada Satpol PP Pandeglang, Mardi Prawira, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku yang menjual miras tanpa izin edar. Penindakan tersebut dilakukan melalui dua proses, yakni non-yustisi dan yustisi.

"Kami melakukan penertiban miras di berbagai tempat seperti warung biasa, tempat hiburan malam, dan area wisata dengan menggunakan metode penertiban non-yustisi," ungkapnya, Selasa (4/6).

Satpol PP Pandeglang menegaskan akan menindak tegas pelaku peredaran minuman keras (miras) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Namun, dalam menangani sanksi tindak pidana ringan (tipiring), Satpol PP menerapkan pendekatan non-yustisi.

Ia menjelaskan, tindakan penindakan pelanggaran Per-

da tentang peredaran minuman keras (miras) bertujuan untuk menjaga dan memulihkan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tanpa melibatkan proses peradilan atau pengadilan.

"Selama tahun 2024 ini, belum ada tindakan yang kami lakukan terkait penerapan Tipiring, baik terhadap penjual maupun pengedar," ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya akan terus melaksanakan razia, terutama menargetkan pedagang besar yang berperan sebagai distributor Minuman Keras (Miras) di wilayah perkotaan dan daerah selatan.

"Kami tidak akan menghentikan upaya ini hanya sampai di sini. Kami akan terus

melakukan razia, baik terhadap pedagang kecil maupun pedagang besar. Kami akan memastikan setiap pelanggaran yang tertangkap akan segera kami proses, untuk memberikan efek jera," tegasnya.

Edi mengimbau dan meminta agar para penjual miras, segera berhenti berjualan bila tidak ingin selalu berhadapan dengan Satpol PP. Karena jelas, penjualan miras sudah dilarang, baik oleh undang-undang dengan kita dan akan kita penjal agar hentikan penjualan miras, kalau belum memiliki izin untuk berjualan. Karena bila para penjual ini tetap berjualan tanpa adanya izin, baik itu distributor atau pengecer. Maka siap-siap saja berhadapan dengan kita dan akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. ● **pra**

Kemenkumham Banten Ajak Perguruan Tinggi Tingkatkan Pendaftaran Paten

SERANG (IM) - Banyaknya potensi yang dimiliki Provinsi Banten dalam hal pendaftaran paten, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten mengajak serta perguruan tinggi di Provinsi Banten untuk meningkatkan potensi pendaftaran paten di Kampus Untirta Sindangheula, Kabu-

paten Serang, Banten.

"Di Provinsi Banten, permohonan Kekayaan Intelektual yang masuk pada tiap tahunnya selalu berada di peringkat 4 (empat) besar di Indonesia. Namun sayangnya, mayoritas permohonan masih didominasi permohonan Merek yang mencapai ribuan, sedangkan jumlah permohonan Paten cukup minim," kata Dodot

Adikoewanto, Selasa (4/6).

Dodot menjabarkan bahwa pendaftaran paten di Provinsi Banten pada 2020, sebanyak 68 permohonan, pada 2021 sebanyak 80 permohonan, pada 2022 sebanyak 66 permohonan, dan pada 2023 sebanyak 62 permohonan.

"Data ini cukup mengkhawatirkan, hal ini mengindikasikan di Universitas Sultan

kaya akan potensi Pendaftaran Paten, dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berada di Provinsi Banten, menunjukkan sejatinya Banten menyimpan potensi yang besar di bidang Paten," katanya menambahkan.

Edukasi paten dan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselenggarakan di Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa ini diterima baik oleh Rektor Untirta Sulaiman.

"Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dan berarti untuk mengubah stigma yang ada jika pendaftaran kekayaan intelektual sulit dan rumit, dan dengan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman baru mengenai kekayaan intelektual," tuturnya. ● **pra**

PPDB Hari Pertama, Plh. Kadisdik: Gerak Cepat Atasi Gangguan Sistem



Plh. Kadisdik Jabar, M. Ade Afriandi bersama Komisi V DPRD Jabar meninjau kesiapan pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Sumedang, SMKN 1 Sumedang, dan SMAN 1 Majalengka, Senin (3/6).

BANDUNG (IM) - Hari pertama pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, SLB Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahap 1 Tahun 2024, mengalami gangguan.

Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar bergerak cepat mengatasi gangguan sistem yang mengalami down tersebut.

"Seperti hari ini (sistem) mengalami down, tim IT bergerak cepat mengatasi gangguan sistem," jelas Plh. Kadisdik Jabar, M. Ade Afriandi bersama Komisi

V DPRD Jabar saat meninjau kesiapan pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Sumedang, SMKN 1 Sumedang, dan SMAN 1 Majalengka, Senin (3/6).

Ia menjelaskan, gangguan ini disebabkan tingginya potensi kuota pada jalur zonasi yang mencapai 50% serta peningkatan signifikan jumlah pendaftar secara mandiri. Akses yang semakin terbuka telah mendorong animo masyarakat untuk mendaftar, yang mengakibatkan beban berlebih pada sistem.

"Namun, kami telah men-

gantisipasi potensi lonjakan pendaftar dan sedang melakukan evaluasi serta tindakan perbaikan yang diperlukan. Meskipun terjadi gangguan, kami ingin menegaskan bahwa calon peserta didik masih dapat mendaftar secara online di sekolah tujuan dengan bantuan operator sekolah," tuturnya.

Bagi yang terkendala pendaftaran secara online, Plh. Kadisdik memberikan alternatif solusi pendaftaran. "Pertama, apabila calon peserta didik terkendala dalam pendaftaran secara mandiri,

dapat melakukan pendaftaran secara online dengan bantuan operator sekolah tujuan," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, sekolah tujuan dapat membantu mendaftarkan calon peserta didik menggunakan akun operator sekolah.

"Terkait kondisi seperti ini, pimpinan telah memberikan arahan untuk tidak menolak pelayanan offline. Karena, prinsipnya tidak ada yang tertinggal. Semua terlayani, semua pendaftar mendapat pelayanan pendidikan," tegasnya.

Plh. Kadisdik menegaskan, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran dan kenyamanan calon peserta didik. "Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami," ucapnya.

Dilaksanakan Sesuai Juknis

Selain itu, Plh. Kadisdik menjelaskan beberapa hal terkait PPDB Jabar. Antara lain, pelaksanaan PPDB 2024 telah dilaksanakan sesuai juknis. "Pertama, mulai dari payung hukum, sarana dan prasarana sudah kami siapkan, termasuk sistem online bekerja sama dengan Diskominfo Jabar," tuturnya.

Untuk sosialisasi internal, tambahnya, sudah dijalankan sejak kick off pada 8 Mei 2024. Dilanjutkan Komitmen Bersama dan penandatanganan Pakta Integritas yang awalnya di level kepala dinas, kepala cabang dinas, kepala sekolah hingga ke satuan pendidikan. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, panitia sekolah, dan operator.

Ia menambahkan, kesiapan pelaksanaan PPDB ini dilanjutkan dengan simulasi dan pengukuran/mitigasi risiko. "Karena, kita juga tidak mau ada masalah. Mulai hari ini, panitia pelaksana melakukan monitoring evaluasi ke seluruh lokasi, terutama yang dikhawatirkan ada gangguan layanan ataupun karena situasi dan kondisi wilayah," ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Plh. Kadisdik didampingi oleh Kepala Bidang PSMK Disdik Jabar, Edy Purwanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Endang Susilastuti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Dewi Nurhulaha serta Koordinator Kehumasan, Dewi Nuraini. ● **lys**